

No. 1 Th. XXVIII 2000

No. ISSN 0126-1650

INFORMASI

Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial

- MASYARAKAT MADANI, MUHAMMADIYAH DAN POLITIK
- K.H. AHMAD RIFA'I DAN GERAKAN PROTES SOSIAL ABAD 19
- BENCHMARKING UNTUK PENGEMBANGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNY
- FUNGSIONALISASI KONFLIK UNTUK REVITALISASI ORGANISASI
- KETERBELAKANGAN DAN KETERGANTUNGAN SEBAGAI SUATU PROSES PEMBANGUNAN

BENCHMARKING UNTUK PENGEMBANGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNY

Oleh: Joko Kumoro

Abstrak

Keputusan Presiden RI nomor 93 tahun 1999 dan keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 274/O/1999 memberikan babak baru dalam perkembangan Universitas Negeri Yogyakarta. Lahirnya UNY ini berarti menambah kompleksnya lingkungan yang dihadapi oleh pendidikan pasca SLTA, Khususnya Universitas. Oleh karena itu sebagai pendatang baru dalam bidang non-kependidikan menghadapi lingkungan turbulence sehingga memerlukan strategi yang mampu menjamin kelangsungan hidup baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Benchmarking (patok duga) merupakan strategi yang cocok digunakan FIS UNY agar mampu tumbuh dan berkembang dimasa mendatang. Meskipun Benchmarking lahir dan dibesarkan dalam dunia bisnis tetapi cukup feasible dipergunakan institusi publik seperti FIS UNY. Hal ini didasarkan pada kondisi keterbukaan dalam dunia pendidikan tuntutan otonomi dan globalisasi.

Sasaran Benchmarking dapat dilakukan terhadap seluruh fungsi dalam institusi maupun sebagian dengan titik berat pada aspek kualitas, produktifitas maupun waktu. Ada beberapa tahapan dalam benchmarking, yaitu: (1) penentuan yang akan dipatok duga; (2) identifikasi pasangan yang akan dipatok duga; (3) pengumpulan informasi; (4) analisis data dan (5) implementasi. Benchmarking merupakan suatu proses kontinyu yang akhirnya akan dicapai keunggulan.

Pendahuluan

Era globalisasi mendorong IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) harus berfikir ulang mengenai orientasi yang telah digariskan selama ini. Semakin sempitnya kesempatan kerja bagi lulusan juga memberikan ilham bagi IKIP untuk memperluas kiprahnya dalam dunia pendidikan. IKIP yang selama ini

hanya menghasilkan tenaga kependidikan dewasa ini perlu mengembangkan juga ilmu non-kependidikan.

Ide ini secara kelembagaan menjadi jelas pelaksanaannya semenjak ke luar Keputusan Presiden nomor 93 tahun 1999. Pada keputusan tersebut disebutkan bahwa secara serentak enam IKIP Negeri di Indo-